

***Implementation of the Accounting Information System at the Secretariat
Division of the Cooperatives and Micro Enterprises Office
of Jombang Regency***

**Implementasi Sistem Informasi Akuntansi di Bagian Kesekretariatan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang**

Ibnu Hilli Pras Azam

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Darul Ulum Jombang
ibnuhilli5@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and analyze the implementation of the Accounting Information System (AIS) at the Secretariat Division of the Cooperatives and Micro Enterprises Office of Jombang Regency, including the financial data processing procedures, the obstacles encountered, and the effectiveness of the system in supporting administrative and financial performance. The background of this study is based on the importance of implementing a transparent and accountable AIS in local government institutions, as well as various obstacles that may affect the effectiveness of its implementation, such as limited human resource capacity and technical constraints in the system used. This study employed a qualitative approach with a descriptive case study design. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and were then analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the implementation of the AIS at the Secretariat Division has combined SOP-based procedures with the use of the SIMDA Keuangan and monev2026 applications, covering the preparation of Direct Appointment Accountability Reports (SPJ), the submission of Direct Payment Requests (SPP), fund disbursement through the NPD-SPMSP2D mechanism, and the preparation of financial reports. Data processing is carried out in stages through verification and authorization, with the fund disbursement process taking approximately 4-5 working hours, while the preparation of financial reports takes a longer time. The obstacles identified include delays in document submission, document returns for revision, a system that is not yet fully integrated, and technical disruptions in the application and network. Nevertheless, the AIS is considered effective in supporting the implementation of administration and financial management in accordance with applicable procedures, as it helps facilitate daily administrative work, although its effectiveness remains vulnerable to technical disruptions whose resolution depends on coordination with BPKAD.

Keywords: Accounting Information System, Implementation, Secretariat, Effectiveness, Local Financial Management.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di Bagian Kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, termasuk prosedur pengolahan data keuangan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas sistem dalam mendukung kinerja administrasi dan keuangan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya penerapan SIA yang transparan dan akuntabel pada instansi pemerintah daerah, serta adanya berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi efektivitas implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kendala teknis pada sistem yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIA di Bagian Kesekretariatan telah memadukan prosedur berbasis SOP dengan pemanfaatan aplikasi SIMDA Keuangan dan monev2026, mencakup penyusunan SPJ Penunjukan Langsung, pengajuan SPP Langsung, pencairan dana melalui mekanisme NPD-SPM-SP2D, hingga penyusunan laporan keuangan. Pengolahan data dilakukan secara berjenjang melalui tahapan verifikasi dan otorisasi, dengan proses pencairan dana membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam kerja, sementara penyusunan laporan keuangan memerlukan waktu yang lebih lama. Kendala yang ditemukan meliputi

keterlambatan pengajuan dokumen, pengembalian dokumen untuk perbaikan, sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta gangguan teknis pada aplikasi dan jaringan. Meskipun demikian, SIA dinilai efektif dalam mendukung pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan sesuai prosedur yang berlaku, karena mampu membantu pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, meskipun efektivitasnya masih rentan terhadap gangguan teknis yang penanganannya bergantung pada koordinasi dengan BPKAD.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Implementasi, Kesekretariatan, Efektivitas, Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi saat ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan penting bagi organisasi sektor publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta pengelolaan administrasi yang lebih efektif dan efisien. Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam bidang keuangan adalah melalui Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks instansi pemerintah, SIA memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi di instansi pemerintah daerah menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang tidak hanya tepat waktu, tetapi juga akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, penggunaan sistem yang terintegrasi menjadi solusi dalam meminimalisi kesalahan pencatatan serta meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi keuangan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran penting dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro di daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dinas ini mengelola berbagai program dan anggaran yang memerlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Bagian kesekretariatan sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan keuangan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses pencatatan dan pelaporan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Sistem Informasi Akuntansi di bagian kesekretariatan diharapkan mampu mendukung kelancaran proses administrasi keuangan, mulai dari pencatatan transaksi, pengolahan data, hingga penyusunan laporan keuangan. Namun, implementasi sistem tersebut tidak selalu berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, kurangnya pelatihan yang memadai, serta adanya kendala teknis pada sistem yang digunakan.

Selain itu, adanya perbedaan tingkat pemahaman antar pegawai terhadap penggunaan sistem juga dapat mempengaruhi efektivitas implementasi Sistem Informasi Akuntansi. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakefisienan dalam proses kerja serta meningkatkan risiko kesalahan dalam pengolahan data keuangan. Oleh

karena itu, diperlukan evaluasi terhadap implementasi sistem yang telah berjalan guna mengetahui sejauh mana efektivitasnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi Sistem Informasi Akuntansi di instansi pemerintah, khususnya di bagian kesekretariatan, merupakan hal yang penting untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara mendalam mengenai bagaimana implementasi sistem tersebut, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

2. Metode

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi sistem informasi akuntansi di lingkungan instansi pemerintah. Penelitian kualitatif meneliti objek dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan, serta berfokus pada makna, proses, dan pemahaman fenomena.

Jenis penelitian studi kasus dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam pada Bagian Kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, khususnya implementasi sistem informasi akuntansi dalam mendukung administrasi dan pengelolaan keuangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta, proses penerapan, kendala, dan faktor pendukung implementasi sistem secara sistematis dan faktual.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 132, Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lokasi dipilih karena bagian kesekretariatan memiliki peran penting dalam administrasi dan pengelolaan keuangan sehingga relevan dengan penelitian sistem informasi akuntansi.

Penelitian berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan penelitian.

Jenis Data

Penelitian menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data kualitatif, berupa penjelasan dan uraian mengenai implementasi sistem informasi akuntansi.
2. Data kuantitatif sebagai pendukung, berupa data angka atau statistik, seperti jumlah laporan keuangan, frekuensi pencatatan, dan data administrasi lainnya.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama untuk memperoleh data penelitian. Teknik yang digunakan meliputi:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui pertanyaan lisan kepada narasumber berdasarkan garis besar permasalahan yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi dan data pendukung penelitian melalui dokumen yang berkaitan dengan hasil wawancara maupun objek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Profil Informan

Bapak Probo menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Bagian Kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Berdasarkan uraian tugas dalam dokumen SOP yang telah dianalisis, posisi Bendahara Pengeluaran menjadi titik simpul dari hampir seluruh alur dokumen keuangan, mulai dari penerimaan berkas SPJ, verifikasi Nota Pencairan Dana (NPD), penyusunan Surat Perintah Membayar (SPM), hingga pengajuan pencairan dana lewat aplikasi SIMDA Keuangan. Dengan kata lain, beliau adalah pihak yang paling intensif berinteraksi langsung dengan Sistem Informasi Akuntansi dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga jawaban yang diperoleh dari wawancara ini bisa dipandang mewakili pengalaman operasional SIA di Bagian Kesekretariatan secara langsung.

Kendala Teknis dan Sumber Daya Manusia dalam Pengoperasian Sistem

Ketika ditanya mengenai kendala yang paling sering muncul dalam mengoperasikan sistem, baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia, Bapak Probo menyatakan bahwa persoalan yang paling sering dijumpai adalah error atau gangguan pada sistem. Menurut penuturannya, gangguan tersebut umumnya berasal dari sisi teknis aplikasi maupun konektivitas jaringan yang dipakai untuk mengakses sistem, sehingga proses input dan pengajuan dokumen keuangan sewaktu-waktu bisa terhenti di tengah jalan. Beliau tidak menyoroti kendala dari sisi kemampuan sumber daya manusia sebagai persoalan utama, melainkan lebih menekankan bahwa gangguan sistem itu sendiri (error aplikasi dan jaringan) menjadi sumber kendala yang paling dirasakan dalam pekerjaan sehari-hari.

Dampak Kendala terhadap Akurasi Pelaporan Keuangan

Terkait dampak kendala teknis terhadap akurasi pelaporan keuangan, Bapak Probo menjelaskan bahwa gangguan sistem tidak serta-merta menyebabkan kesalahan pada angka atau data yang tersaji, tetapi lebih berdampak pada tertundanya penyelesaian pelaporan. Dengan kata lain, ketika sistem error, proses yang semestinya bisa diselesaikan pada hari yang sama menjadi molor, sehingga penyelesaian akhir dokumen maupun laporan keuangan mundur dari target waktu yang sudah ditetapkan. Proses penyusunan laporan keuangan memang sudah membutuhkan waktu yang relatif panjang secara prosedural, sehingga tambahan hambatan akibat gangguan sistem berpotensi memperpanjang keterlambatan tersebut.

Efektivitas Sistem dalam Mendukung Kinerja Administrasi Keuangan

Hasil wawancara, Bapak Probo menilai bahwa Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan sudah cukup efektif dalam mendukung pengelolaan administrasi keuangan. Meskipun masih terdapat kendala teknis, sistem dinilai mampu mempermudah pekerjaan sehari-hari sehingga manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan hambatan yang terjadi.

Upaya Penanganan Kendala dan Koordinasi dengan Pemerintah

Pusat/Provinsi hasil wawancara, kendala teknis pada sistem umumnya ditangani dengan menunggu proses perbaikan dari pihak pengelola aplikasi karena Bagian Kesekretariatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan gangguan sistem dilakukan secara terpusat.

Selain itu, Bapak Probo menjelaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait tetap dilakukan apabila terdapat kendala atau usulan perbaikan sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan aplikasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Bagian Kesekretariatan, tetapi melibatkan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sistem.

Rangkuman Temuan Wawancara

1. Hasil wawancara dengan Bapak Probo tentang bagaimana kendala apa yang sering dihadapi? kendala utama dalam pengoperasian sistem bersifat teknis, yaitu error aplikasi maupun gangguan jaringan, bukan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia.
2. Bagaimana kendala tersebut dalam mempengaruhi akurasi pelaporan keuangan? Dampak kendala tersebut adalah tertundanya penyelesaian pelaporan keuangan, bukan kesalahan akurasi data.
3. Apakah sistem ini sudah efektif mendukung kinerja administrasi keuangan? dinilai efektif dan sangat membantu pekerjaan administrasi keuangan sehari-hari .
4. Upaya apa yang dilakukan dinas untuk mengatasi kendala tersebut? penanganan kendala tersebut yaitu menunggu pemulihan dari pihak pengelola sistem, karena perbaikan berada di luar kewenangan Bendahara.
5. Apakah terdapat kordinasi dengan pemerintah pusat/daerah? terdapat koordinasi dengan pemerintah pusat/provinsi terkait kendala maupun usulan perbaikan sistem, yang berjalan melalui BPKAD Kabupaten Jombang selaku pengelola aplikasi di tingkat daerah.

Sesuai dengan teknik keabsahan data yang dijelaskan , penelitian ini melakukan analisis kesesuaian alur bisnis dengan membandingkan SOP dan bagan alur yang digunakan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Hasil analisis tersebut disajikan pada bagian berikut.

Tabel 1. Pemetaan Kesesuaian Alur Bisnis SIA terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan

Tahapan SPKA	Prosedur Dokumen SOP/Bagan Alur	Ketentuan Normatif Terkait	Status Kesesuaian
Perencanaan	Penyusunan DPA dan Daftar Harga sebagai dasar Draft SPP LS (SOP SPP LS butir 1)	PP 71/2010 tentang prinsip anggaran berbasis kinerja; Permendagri 77/2020	Sesuai
Pelaksanaan	Penyusunan kuitansi dan SPJ oleh Staf-PPK-Kepala Dinas (SOP SPJ PL butir 1-4)	Prinsip pemisahan fungsi dalam SAP	Sesuai

Verifikasi Dokumen	Verifikasi NPD oleh Bendahara dengan mekanisme pengembalian jika tidak valid (Bagan Alur NPD)	Prinsip pengendalian intern PP 71/2010	Sesuai, dengan mekanisme kontrol berlapis
Penatausahaan/ Pengajuan	Pengajuan SPP/SPM melalui SIMDA Keuangan ke BPKAD (SOP SPP LS butir 6)	Permendagri 77/2020 tentang penatausahaan elektronik	Sesuai, terkomputerisasi sebagian
Pencairan Dana	Verifikasi SPM dan penerbitan SP2D oleh BPKAD (Bagan Alur NPD tahap 4)	PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Sesuai
Pelaporan	Penyusunan Laporan Keuangan berjenjang (SOP Laporan Keuangan butir 1–8)	PP 71/2010 tentang penyajian LRA, Neraca, LO, LPE, CaLK	Sesuai secara prosedural

Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan hasil analisis dokumen, 2026.

Berdasarkan hasil analisis, alur bisnis Sistem Informasi Akuntansi di Bagian Kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari aspek pemisahan fungsi, mekanisme pengendalian internal, maupun tahapan penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Namun, hasil penelitian ini hanya menunjukkan kesesuaian dari sisi prosedur yang diterapkan. Sementara itu, aspek lain seperti ketepatan waktu penyusunan laporan, akurasi data, dan tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem memerlukan pembahasan lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sistem.

Konsistensi Antardokumen

Hasil triangulasi menunjukkan bahwa ketiga SOP memiliki format dan struktur yang konsisten serta disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Masingmasing SOP memuat komponen seperti dasar hukum, kualifikasi pelaksana, keterkaitan antar-SOP, peralatan, peringatan, serta pencatatan dan pendataan. Meskipun demikian, peneliti menemukan bahwa pada SOP Penyusunan Laporan Keuangan masih terdapat kolom keterkaitan yang belum diisi secara lengkap, sehingga dapat menyulitkan pegawai baru dalam memahami hubungan antarprosedur.

Selain memiliki format yang seragam, ketiga SOP juga saling berkaitan dalam pelaksanaannya. Dokumen SPJ yang dihasilkan dari SOP Penyusunan Dokumen SPJ Penunjukan Langsung menjadi dasar dalam proses Pengajuan SPP Langsung (LS). Selanjutnya, transaksi yang telah diproses melalui mekanisme SPP, SPM, dan SP2D digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa seluruh SOP membentuk satu rangkaian proses dalam Sistem Informasi Akuntansi di Bagian Kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang.

Kendala dalam Implementasi Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan hasil analisis dokumen, peneliti mengidentifikasi beberapa potensi kendala dalam pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi yang selanjutnya dikonfirmasi melalui hasil wawancara dengan informan penelitian.

1. Ketepatan waktu antarbidang. SOP Pengajuan SPP Langsung (LS) menunjukkan bahwa keterlambatan pengajuan SPP setelah pelaksanaan kegiatan dapat menghambat proses penerbitan SP2D. Hal ini menunjukkan bahwa kelancaran sistem sangat dipengaruhi oleh ketepatan waktu penyampaian dokumen dari setiap bidang.
2. Pengembalian dokumen untuk perbaikan. Bagan alur pencairan dana melalui NPD menunjukkan adanya tahapan perbaikan dokumen apabila hasil verifikasi belum sesuai. Kondisi ini dapat memperpanjang proses pencairan dana apabila terjadi berulang.
3. Proses penyusunan laporan keuangan. SOP Penyusunan Laporan Keuangan memperlihatkan bahwa proses penyusunan laporan memerlukan beberapa tahapan dan waktu yang cukup panjang. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan.
4. Sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi. Meskipun proses pengelolaan keuangan telah menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan dan monev2026, beberapa tahapan masih dilakukan secara manual, seperti penggunaan dokumen fisik dan proses paraf. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pekerjaan ganda dan meningkatkan risiko kesalahan.

Hasil analisis tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Riski Probo Kristanto, A.Md.Ak., selaku Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan wawancara, kendala yang paling sering dihadapi adalah gangguan teknis pada aplikasi maupun jaringan yang digunakan dalam proses pengelolaan keuangan. Gangguan pada aplikasi maupun jaringan menyebabkan proses input dan pengajuan dokumen tidak dapat dilakukan secara optimal sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian pelaporan keuangan. Namun, kendala tersebut tidak memengaruhi keakuratan data yang dihasilkan.

Upaya Mengatasi Kendala Implementasi Sistem Informasi Akuntansi

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga mengenai upaya dalam mengatasi kendala implementasi Sistem Informasi Akuntansi, peneliti mengidentifikasi beberapa langkah yang telah diterapkan berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara.

1. Verifikasi berjenjang ; Proses verifikasi oleh Bendahara, Kasubag Keuangan, Sekretaris, dan Kepala Dinas dilakukan untuk memastikan dokumen telah sesuai sebelum diajukan ke BPKAD. Tahapan ini membantu mengurangi risiko kesalahan dalam proses pencairan dana.
2. Pemanfaatan aplikasi; Penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan dan monev2026 mendukung proses pengelolaan keuangan, terutama pada pengajuan dokumen dan penyusunan bukti pembayaran, sehingga proses administrasi menjadi lebih tertata.
3. Koordinasi dalam penanganan gangguan sistem ; Berdasarkan hasil wawancara, apabila terjadi gangguan pada aplikasi atau jaringan, Bagian Kesekretariatan menunggu proses perbaikan dari pihak pengelola sistem karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan secara langsung. Selain itu, koordinasi

dengan BPKAD tetap dilakukan untuk menyampaikan kendala maupun usulan perbaikan sistem.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti melihat bahwa penanganan gangguan sistem masih bergantung pada pihak pengelola aplikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terdapat mekanisme alternatif yang dapat digunakan ketika sistem mengalami gangguan, sehingga hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem pada masa mendatang.

Evaluasi Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Berdasarkan Model DeLone dan McLean

Sesuai dengan kerangka konsep penelitian, evaluasi kualitas Sistem Informasi Akuntansi dalam penelitian ini mengacu pada model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003) yang terdiri atas enam dimensi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, intensitas penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Penilaian awal dilakukan berdasarkan hasil analisis dokumen, sedangkan aspek kepuasan pengguna dilengkapi berdasarkan hasil wawancara.

Kualitas Sistem

Dari aspek kualitas informasi, Sistem Informasi Akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan SOP, meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Buku Kas Umum (BKU), Buku Pajak, dan Rekening Koran. Kelengkapan laporan tersebut menunjukkan bahwa informasi yang dihasilkan telah mendukung penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Namun, tingkat akurasi dan ketepatan waktu penyajian informasi masih perlu dikonfirmasi melalui hasil wawancara dengan pengguna sistem.

Kualitas Informasi

Dari aspek kualitas informasi, Sistem Informasi Akuntansi menghasilkan berbagai laporan keuangan sesuai dengan SOP, seperti Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Buku Kas Umum (BKU), Buku Pajak, dan Rekening Koran. Kelengkapan laporan tersebut menunjukkan bahwa informasi yang dihasilkan telah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Namun, kualitas informasi, khususnya terkait akurasi dan ketepatan waktu penyajian, masih perlu didukung oleh hasil wawancara dengan pengguna sistem.

Kualitas Layanan

Berdasarkan hasil wawancara, penanganan gangguan pada sistem dilakukan oleh pihak pengelola aplikasi melalui koordinasi dengan BPKAD Kabupaten Jombang dan instansi terkait. Bagian Kesekretariatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan secara langsung sehingga harus menunggu proses penanganan dari pihak pengelola. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas layanan sistem sangat bergantung pada respons pihak pengelola aplikasi. Adapun informasi mengenai waktu respons penanganan gangguan belum diperoleh dalam penelitian ini sehingga masih dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut..

Intensitas Penggunaan

Berdasarkan analisis SOP, intensitas penggunaan sistem elektronik terjadi pada titik-titik tertentu dalam siklus, yaitu pada tahap pengajuan SPP/SPM melalui SIMDA Keuangan (SOP SPP LS butir 6) dan pada tahap pencetakan bukti pembayaran melalui monev2026 (sebagaimana tercermin dalam dokumen Bend.46). Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan sistem elektronik bersifat rutin dan berulang setiap kali terjadi transaksi belanja, namun masih terbatas pada fungsi pengajuan dan pencetakan dokumen, belum mencakup keseluruhan siklus mulai dari input data hingga pelaporan secara end-to-end.

Kepuasan Pengguna

Hasil wawancara dengan Bapak Probo menunjukkan tingkat kepuasan yang positif terhadap sistem yang digunakan. Ketika ditanya soal efektivitas sistem dalam mendukung kinerja administrasi keuangan, beliau menegaskan bahwa sistem tersebut pasti membantu pekerjaan sehari-hari. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sesekali mengalami gangguan teknis, persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*) yang dirasakan pengguna tetap tinggi, sehingga secara keseluruhan Bendahara Pengeluaran selaku pengguna utama sistem menilai SIA yang diterapkan di Bagian Kesekretariatan sudah efektif dan bermanfaat, meski penilaian ini masih terbatas pada satu informan dan belum tentu mewakili persepsi seluruh pegawai pengguna sistem lainnya.

Manfaat Bersih

Manfaat bersih dari implementasi SIA dapat dilihat dari sisi akuntabilitas dan efisiensi proses. Adanya jejak dokumen (*audit trail*) berupa kode QR pada bukti pembayaran, kode kegiatan dan sub-kegiatan yang terstruktur, serta mekanisme verifikasi berjenjang, memberikan manfaat berupa peningkatan transparansi dan kemudahan penelusuran transaksi keuangan. Di sisi lain, manfaat berupa efisiensi waktu dan pengurangan beban administratif pegawai masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut melalui wawancara, mengingat sejumlah tahapan masih memerlukan proses manual yang memakan waktu relatif lama, terutama pada tahap penyusunan laporan keuangan yang bisa mencapai lebih dari satu bulan.

Tabel 2. Ringkasan Evaluasi Kualitas SIA Berdasarkan Model DeLone dan McLean (2003)

Dimensi	Temuan Berdasarkan Analisis Dokumen	Status
Kualitas Sistem	Sistem menghasilkan dokumen terstandarisasi dengan kode QR dan struktur KKN terbaru	Terkonfirmasi dokumen
Kualitas Informasi	Struktur laporan keuangan lengkap sesuai PP 71/2010 (LRA, Neraca, LO, LPE, CaLK)	Terkonfirmasi dokumen
Kualitas Layanan	Belum dapat dinilai dari dokumen	-
Intensitas Penggunaan	Digunakan pada tahap pengajuan SPP/SPM dan pencetakan bukti pembayaran	Terkonfirmasi dokumen
Kepuasan Pengguna	Belum dapat dinilai dari dokumen	-
Manfaat Bersih	Peningkatan transparansi melalui <i>audit trail</i> ; efisiensi waktu belum terkonfirmasi	Sebagian terkonfirmasi

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026.

Uji Keabsahan Data

Sesuai teknik keabsahan data yang telah dijelaskan, peneliti melakukan tiga tahap pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu triangulasi dokumen, uji konfirmabilitas melalui telaah dokumen sekunder, dan uji dependabilitas melalui audit trail dokumen.

Triangulasi dokumen dilakukan dengan membandingkan tiga sumber, yakni dokumen SOP, dokumen transaksi, dan bagan alur internal. Ketiga sumber tersebut menunjukkan konsistensi informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat (Bendahara Pengeluaran, PPTK, PPK, Kasubag Keuangan, Sekretaris, dan Kepala Dinas) serta alur dokumen yang saling sejalan, mulai dari SPJ, NPD/SPP, SPM, hingga SP2D. Tidak ditemukan kontradiksi mendasar di antara ketiga sumber dokumen tersebut, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid dari sisi konsistensi antardokumen.

Uji konfirmabilitas dilakukan dengan menelaah kesesuaian temuan terhadap regulasi yang menjadi dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Seluruh SOP yang dianalisis mencantumkan dasar hukum tersebut secara eksplisit, sehingga temuan penelitian ini dapat dikonfirmasi bersumber dari ketentuan resmi, bukan interpretasi subjektif peneliti.

Uji dependabilitas dilakukan melalui audit trail dokumen dengan mencatat sumber dan tanggal perolehan setiap dokumen. Dokumen SOP diperoleh dari arsip resmi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, sementara dokumen Bend.46 diperoleh dari sistem elektronik monev2026 pada tanggal 22 Juli 2026 dengan nomor referensi dokumen 82464. Pencatatan jejak dokumen ini memungkinkan seluruh temuan dalam penelitian ini ditelusuri kembali ke sumber aslinya oleh pihak lain, termasuk dosen pembimbing selaku auditor penelitian.

Pembahasan

Implementasi Sistem Informasi Akuntansi di Bagian Kesekretariatan

Untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai bagaimana implementasi Sistem Informasi Akuntansi di Bagian Kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SIA sudah berjalan melalui kombinasi antara prosedur manual yang terstandardisasi dalam bentuk SOP dan pemanfaatan aplikasi elektronik (SIMDA Keuangan dan monev2026) pada titik-titik tertentu dalam siklus akuntansi pengeluaran daerah. Implementasi ini mencakup empat prosedur utama yang saling berkaitan, yaitu penyusunan SPJ Penunjukan Langsung, pengajuan SPP Langsung (LS), pencairan dana melalui mekanisme NPDSPMSP2D, dan penyusunan laporan keuangan, yang secara keseluruhan membentuk satu siklus SPKA (Sistem Pengelolaan Keuangan dan Administrasi) sebagaimana dikemukakan dalam kerangka konsep penelitian.

Gambaran ini semakin diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Probo selaku Bendahara Pengeluaran, yang dalam praktiknya berperan sebagai pengguna utama (primary user) SIA di Bagian Kesekretariatan. Pernyataan beliau bahwa sistem “pasti membantu” pekerjaan sehari-hari menegaskan bahwa dari sudut pandang

pelaksana lapangan, digitalisasi sebagian proses melalui SIMDA Keuangan dan monev2026 memberikan nilai tambah nyata dibandingkan proses manual sepenuhnya, sekalipun sistem tersebut belum bebas dari gangguan teknis.

Kendala dalam Implementasi Sistem Informasi Akuntansi

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, kendala yang teridentifikasi dari analisis dokumen mencakup risiko keterlambatan pengajuan dokumen yang berdampak pada gagalnya penerbitan SP2D, mekanisme pengembalian dokumen (rework) akibat NPD yang tidak valid atau tidak lengkap, rentang waktu penyusunan laporan keuangan yang relatif panjang, serta kondisi sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi secara elektronik (hybrid antara manual dan digital).

Hasil wawancara dengan Bapak Probo memperkuat sekaligus melengkapi temuan dokumen tersebut dengan mengungkap satu kendala yang tidak tercermin secara eksplisit dalam SOP, yaitu gangguan teknis berupa error aplikasi dan jaringan pada saat pengoperasian sistem sehari-hari. Menariknya, kendala ini berdampak pada dimensi waktu penyelesaian (keterlambatan), bukan pada dimensi akurasi data, sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko utama dari sisi teknis dalam implementasi SIA di Bagian Kesekretariatan adalah risiko keterlambatan proses, bukan risiko kesalahan pencatatan. Temuan ini juga mengonfirmasi bahwa faktor sumber daya manusia bukan merupakan sumber kendala utama menurut pengalaman Bendahara Pengeluaran, berbeda dengan asumsi awal.

Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dalam Mendukung Kinerja Administrasi dan Keuangan

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga mengenai sejauh mana efektivitas SIA dalam mendukung kinerja administrasi dan keuangan, hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa SIA sudah efektif dari sisi kepatuhan prosedural (procedural compliance), yaitu seluruh tahapan sudah terdokumentasi dengan jelas dan sesuai ketentuan normatif yang berlaku. Efektivitas dari sisi substantif, seperti ketepatan waktu, akurasi data, dan kepuasan pengguna, merupakan dimensi yang penilaiannya sangat bergantung pada data wawancara sebagaimana kerangka evaluasi DeLone dan McLean yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penilaian langsung dari Bapak Probo, empat dari enam dimensi model DeLone dan McLean bisa dikonfirmasi secara kualitatif: kualitas sistem dan kualitas informasi terkonfirmasi melalui dokumen; intensitas penggunaan terkonfirmasi berjalan rutin pada tahap pengajuan dan pencetakan dokumen; dan kepuasan pengguna terkonfirmasi positif melalui pernyataan bahwa sistem “pasti membantu”.

Dimensi kualitas layanan menunjukkan pola ketergantungan pada pihak eksternal (BPKAD/pusat) sehingga sulit dinilai sepenuhnya optimal dari sudut pandang pengguna di tingkat operasional, sedangkan dimensi manfaat bersih dapat disimpulkan positif dari sisi persepsi kebermanfaatan, meski belum diukur secara kuantitatif dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa SIA di Bagian Kesekretariatan sudah efektif mendukung kinerja administrasi keuangan, dengan catatan bahwa efektivitas tersebut masih rentan terhadap gangguan teknis yang penanganannya bergantung pada koordinasi dengan BPKAD dan pemerintah pusat/provinsi, sejalan dengan tekanan institusional dari PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mendorong penerapan sistem yang terstandardisasi secara nasional.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa Sistem Informasi Akuntansi di Bagian Kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang sudah diimplementasikan sesuai kerangka regulasi yang berlaku dan didukung prosedur yang terstandarisasi, dengan tingkat digitalisasi yang bersifat parsial pada tahap pengajuan dan dokumentasi transaksi.

Keberhasilan implementasi ini pada akhirnya bermuara pada tujuan akhir sebagaimana digambarkan dalam kerangka konsep penelitian, yaitu terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dinas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Akuntansi di Bagian Kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi telah menggabungkan SOP dengan aplikasi SIMDA Keuangan dan monev2026, meliputi penyusunan SPJ Penunjukan Langsung, pengajuan SPP-LS, pencairan dana melalui mekanisme NPD-SPM-SP2D, dan penyusunan laporan keuangan. Sistem membantu administrasi keuangan melalui proses verifikasi dan otorisasi berjenjang. Pencairan dana membutuhkan sekitar 4–5 jam kerja, sedangkan penyusunan laporan membutuhkan waktu lebih lama. Gangguan sistem lebih berdampak pada keterlambatan pelaporan daripada keakuratan data.
2. Kendala implementasi meliputi keterlambatan pengajuan dan perbaikan dokumen, proses penyusunan laporan yang panjang, sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta gangguan aplikasi dan jaringan. Penanganan kendala teknis dilakukan melalui koordinasi dengan BPKAD.
3. Sistem Informasi Akuntansi telah mendukung administrasi dan pengelolaan keuangan sesuai prosedur yang berlaku serta dinilai efektif dalam membantu pekerjaan, meskipun masih terdapat kendala teknis.
4. Pencatatan keuangan berlangsung melalui siklus SPKA, yaitu penyusunan SPJ, pengajuan SPP-LS, pencairan melalui NPD-SPM-SP2D, dan penyusunan laporan keuangan. Proses tersebut menggunakan kombinasi prosedur manual dan aplikasi SIMDA Keuangan serta monev2026, sehingga digitalisasi masih bersifat parsial.

Saran

Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang

1. Meningkatkan integrasi sistem untuk mengurangi proses manual dan meminimalkan risiko kesalahan.
2. Meningkatkan proses verifikasi melalui checklist kelengkapan dokumen agar mengurangi pengembalian dokumen.
3. Melaksanakan pelatihan berkala penggunaan SIMDA Keuangan dan monev2026 bagi pegawai.

Bagi Peneliti

1. Menambah jumlah informan dari berbagai bagian agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
2. Menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed method* untuk mengukur efektivitas sistem secara lebih objektif.
3. Melakukan penelitian komparatif dengan instansi pemerintah daerah lainnya.

5. Daftar Pustaka

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang. (2026). *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS)*. Dokumen Internal.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. (2026). *Bagan Alur Pencairan Dana melalui Nota Pencairan Dana (NPD), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)*. Dokumen Internal.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. (2026). *Dokumen Bukti Pembayaran (Formulir Bend.46)*. Dokumen Internal.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. (2026). *Standar Operasional Prosedur Penyusunan Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penunjukan Langsung*. Dokumen Internal.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. (2026). *Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan*. Dokumen Internal.
- Gunawan, I. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hall, J. A. (2021). *Accounting information systems* (10th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2021). *Akuntansi intermediate*. Jakarta: Erlangga.
- Krismiaji. (2020). *Sistem informasi akuntansi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2023). *Sistem akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, A. (2021). *Analisis dan perancangan sistem informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pemerintah Kabupaten Jombang. (2026). *Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev2026)*. <https://monev2026.jombangkab.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Putra, A. (2020). Analisis penerapan sistem informasi akuntansi pada instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). *Accounting information systems* (15th ed.). Pearson.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). *Accounting information systems*. Jakarta: Salemba Empat.
- Satori, D., & Komariah, A. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A. (2020). *Sistem informasi akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Susanto, A. (2020). *Sistem informasi akuntansi: Konsep dan pengembangan secara terpadu*. Bandung: Lingga Jaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.